BAB II

UPAYA KOMISI KEBENARAN dan REKONSILIASI MENYELESAIKAN PELANGGARAN HAM di AFRIKA SELATAN

Pelanggaran HAM berat yang banyak atau sering terjadi saat ini ternyata tidak hanya dialami oleh negara-negara yang kaya dan menjadi perebutan sumber daya alamnya saja. Akan tettapi banyak juga negara-negara lain yang bisa dibilang negara miskin juga pernah mengalami masalah pelanggaran HAM berat dan melibatkan negara lain masuk kedalam zona konflik tersebut. Kasus pelanggaran HAM berat yang kini semakin mendapatkan perhatian yang lebih dari dunia Internasional semakin gencar melakukan penyelesaian. Penyelesaian dengan jalan damai tanpa menggunakan kekerasan. Maka atas persetujuan beberapa pihak, termasuk yang berkonflik Dewan Keamanan PBB mengusulkan untuk membentuk suatu lembaga perdamaian yang bertugas untuk menyelesaikan masalah ini.

Salah satu lembaga yang dibentuk pemerintah adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau yang buasa disebut dengan KKR. KKR bekerja untuk menangani masalah pelangaran HAM dan mencari bukti-bukti serta para pelaku tanpa menggunakan kekerasan. Mereka bekerja secara perlahan namum pasti, bahkan mereka juga bisa mendapatkan pengakuan langsung dari pelaku yang melakukan tindak kejahatan tersebut tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman. Negra-negara yang menggunakan KKR sebagai pihak ketiga salah satunya adalah

A. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah sebuah komisi yang diberikan tugas untuk menemukan dan mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada masa lampau oleh suatu pemerintahan. Maka komisi ini dibentuk guna untuk menyelesaikan konflik yang tertinggal pada masa itu. Komisi ini juga tidak jarang dibentuk oleh negara-negara yang muncul dari masa-masa pergolakan internal, perang saudara atau pemerintahan diktatur.

Berdasarkan UU Republik Indonesia no. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi komisi ini dibentuk berdasarkan kemandirian, bebas dan tidak memihak, kemaslahatan, keadilan, kejujuran, keterbukaan, perdamaian dan persatuan bangsa.[22] Adapun tujuan dibentuknya komisi ini adalah untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu diluar pengadilan, guna untuk mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa dan mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian.[23] Maka dengan begitu diharapkan hasil yang didapat akan dapat sedikit membantu menyelesaikan masalah pelanggaran HAM ini. Karena penyelesaian yang ditempuh melalui jalur damai bukan dengan kekerasan yang justru akan menimbulkan rasa ingin balas dendam.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau yang lebih sering kita sebut dengan (KKR), mempunyai fungsi kelembagaan yang bersifat publik untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut Komisi

---

[22] UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI .,yang diakses di http: hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_27_04.htm pada tanggal 29 Okt 2013., Pkl. 11.32 WIB

[23] Ibid..

Kebenaran dan Rekonsiliasi mempunyai tugas yang antara lain adalah:

a) Menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya
b) Melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat
c) Memberikan rekomendasi kepada presiden dalam hal permohonan amnesti
d) Menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal pemberian kompensasi dan atau rehabilitasi
e) Menyampaikan laporan tahunan dal laporan akhir tentang pelaksanaan tugas dan wewenang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya, kepada presiden dan dewan perwakilan rakyat dengan tembusan kepada mahkamah agung.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini dibentuk selain menjadi amanat dan kesepakatan damai Helsinki, khusus untuk penyelesaian permasalahan pelanggaran HAM berat masa lalu juga menjadi mandat utama dari Tap MPR No. V/MPR/2000 tentang pemantapan persatuan nasional. Oleh karena itulah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini dibentuk.

Pembentukan KKR ini penting sebagai salah satu panduan dalam perjalanan bangsa ke depan, atau dalam Tap MPR ini salah satunya disebutkan, akan sangat berpengaruh pada penegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan, yang diterapkan secara konsisten dan bertangungjawab, serta menjamin dan menghormati hak asasi manusia. Untuk menjamin terlaksananya itu semua, perlu didahului dengan penyelesaian berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia. Dalam pengimplementasiannya, TAP MPR

Nasional, sebagai sebuah lembaga ekstra-yudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan dengan undang-undang.[24]

Komisi ini mempunyai alat kelengkapan berupa Sidang Komisi dan Sub Komisi. Sidang Komisi yang dimaksudkan adalah sebagai pemegang kekuasaan komisi tertinggi sedangkan Sub Komisi adalah pemegang kekuasaan sesuai dengan wewenang sub komisi yang bersangkutan. Berdasarkan tujuan dari pembentukan KKR diberbagai negara, maka KKR seharusnya bukan semata-mata menentukan upaya rekonsiliasi tetapi memberikan sebuah catatan resmi tentang pelanggaran HAM masa lalu (*historical record of past abuses*). Dari catatan ini akan menentukan dan menjadi dasar bagaimana memperlakukan para pelaku, memperlakukan korban dan memperbaiki kondisi yang selama ini tercabik-cabik dalam konflik. Untuk tujuan tersebut, menentukan mandat dari KKR yang akan dibentuk sangat relevan dengan melihat kondisi riil konteks pelanggaran HAM yang terjadi. Maka dari itu sebelum KKR dibentuk perlu terlebih dahulu dibentuk Panitia Bersama yang melibatkan perwakilan pemerintah RI dan seluruh komponen masyarakat untuk menentukan dua hal yaitu persoalan apa dan sampai kapan masa lalu yang hendak ditelusuri. Kedua adalah menentukan siapa Komisioner dari KKR. Hasil dari Panitia Bersama inilah yang seharusnya ditindaklanjuti oleh KKR. Hal ini penting agar seluruh komponen merasa terlibat dari awal dalam pembentukan KKR.

Sebagaimana KKR yang secara keseluruhan tidak memiliki batasan tegas, maka demikian halnya kebenaran. Salah satu defenisi paling mendasar dikemukakan oleh Jurgen Habermas yang membagi kebenaran ke dalam tiga

---

[24] Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai salah satu Agenda Hak Asasi Manusia di Aceh.,yang

katagori. *Pertama*, kebenaran faktual, yaitu benar-benar terjadi atau nyata-nyata ada. *Kedua*, kebenaran normatif, yaitu berkaitan dengan apa yang dirasakan adil atau tidak adil, dan *ketiga*, kebenaran hanya akan menjadi kebenaran jika dinyatakan dengan cara yang benar.[25]

Komisi "kebenaran" dalam konteks ini adalah kebenaran yang memadukan ketiga katagori tersebut. Sebuah komisi harus mencari, menemukan dan mengemukakan fakta atau kenyataan tentang suatu peristiwa dengan segala akibatnya. Menimbang dan menempatkan keadilan korban dan pelaku sebagai prinsip kerja, tidak boleh berlaku tidak *fair* dan tidak adil terhadap pelaku sekalipun dan yang terakhir semua temuan harus dinyatakan secara benar, *fair*, jujur dan transparan dan tidak manipulatif. Jika ketiga aspek itu tidak terpenuhi, maka temuan Komisi dan bahkan Komisi itu sendiri tidak akan dipercaya.[26]

Demikian pula halnya dengan konsep Rekonsiliasi. Secara etimologis, istilah ini tidak terlalu jelas. Priscilla yang mengutip *Oxford English Dictionary* mendefinisikan"*reconcile*" sebagai"*to bring (a person) again into friendly relations.....after an estrangement...to bring back into concord, to reunite (persons or things) in harmony* (berbalik kembali dengan seseorang setelah masa-masa keterasingan mengakurkan kembali, menyatukan kembali (orang atau barang) ke kondisi harmoni. Dalam konteks konflik atau kekerasan politik, rekonsiliasi dijabarkan sebagai "mengembangkan saling penerimaan yang bersifat damai antara orang-orang atau kelompok yang bermusuhan atau dahulunya bermusuhan."[27]

---

[25] Jurgen Habermas, *The Theory of Communication Action*, Jilid I, Boston, 1984.

B. Latar Belakang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah fenomena yang timbul di era transisi politik dari suatu rezim otoriter ke rezim demokratis, terkait dengan persoalan penyelesaian kejahatan kemanusian yang dilakukan rezim sebelumnya. Pemerintahan transisi berusaha menjawab masalah tersebut dengan mencoba mendamaikan kecenderungan menghukum di satu sisi dengan kecenderungan memberi maaf atau amnesti di sisi yang lain. Sebagai "jalan tengah" tentu saja upaya demikian tidak sepenuhnya memuaskan banyak pihak, terutama korban, keluarga korban dan organisasi masyarakat sipil, tetapi itulah usaha pemerintahan transisi yang dapat dilakukan, mengingat kejahatan kemanusian yang dilakukan rezim sebelumnya mengandung dimensi politik, psikologis dan hukum yang sangat kompleks.

Sejak kemunculannya pertama kali di Argentina dan Uganda pada medium 1980-an, KKR telah menjadi fenomena internasional. Lebih dari 20 negara telah memilih jalan mendirikan KKR sebagai cara mempertanggungjawabkan kejahatan hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu. Beberapa di antaranya mencatat sukses yang hebat, meski tentu saja ada yang setengah berhasil, dan ada juga dilanda kegagalan.

Kesadaran pentingnya mengusut, mengungkap kebenaran dan meminta pertanggung jawaban rezim masa lalu yang melakukan kejahatan kemanusian, secara teoritis, diyakini banyak aktivis pro demokrasi merupakan jalan menuju demokrasi. Tidak mungkin sebuah bangsa dapat hidup bersatu padu dalam damai di atas sejarah penuh luka dan kekerasan. Proses transisi menuju demokrasi harus

Pemerintahan yang baru harus menemukan jalan keluar untuk meneruskan detak nadi kehidupan, menciptakan ulang ruang nasional yang damai dan layak dihuni, membangun semangat dan upaya rekonsiliasi dengan para musuh masa lampau, dan mengurung kekejaman masa lampau dalam sangkar masa lampaunya sendiri.[28]

Persoalannya apa yang harus dan bisa dilakukan masyarakat dan kekuasaan yang menggantikan dalam menghadapi kejahatan berat kemanusian masa lalu? Dari pengalaman beberapa negara dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, terdapat berbagai bentuk strategi. Ada yang mengadili secara massal pendukung orde terdahulu, ada yang "menutup buku" tanpa syarat, bahkan ada yang melalui "peradilan rakyat" seperti yang terjadi di Perancis terhadap keluarga kerajaan Louis XIV, dan sejumlah pejabatnya tewas dipenggal ala Guillotine. Menjelang akhir abad 20, pengadilan rakyat terjadi lagi terhadap keluarga Presiden Nicola Ceausecu di Ruminia, dan yang terakhir pengadilan rakyat atas rezim Kabul di mana rakyat membunuh dan menggantung jasad Najibullah di tiang lampu jalan, di sebuah jalan utama di kota Kabul, Afganistan. Sementara para demokrat Spanyol setelah kematian Franco memilih untuk tidak melakukan apa-apa, tanpa pengadilan dan penyelesaian lainnya. Sedang di Republik Ceko dikeluarkan undang-undang"lustrasi", sebagaimana juga di Hungaria meski lebih terbatas dan tidak dijalankan dengan konsisten.[29]

Proses legal yang berhasil membawa para pelaku kejahatan masa lalu ke pengadilan, selama dan setelah pemerintahan transisi sangat penting artinya. Proses ini mempunyai peran besar dalam menghilangkan praktik kekebalan hukum

---

[28] Ifdal Kasim, dkk (ed.). *Setelah Otoritarianisme Berlalu: Esai-Esai Keadilan di Masa Transisi*, ELSAM, Jakarta, 2001, hlm. vi.

[29]

(impunity) atau "perlakuan istimewa" lainnya yang sebelumnya selalu dinikmati oleh para pemimpin negara dan aparat negara tingkat tinggi yang melanggar hak asasi manusia di masa lalu. Menurut argumen di atas, pengadilan sebagai proses legal untuk mengakhiri praktik "*impunity*" telah menjadi syarat utama keberhasilan dalam menjunjung tinggi keadilan di masa yang akan datang.

Rezim baru atau demokrasi baru membutuhkan legitimasi sebagai dasar stabilitas politik. Pengadilan dinilai banyak praktisi hukum sebagai hal yang penting untuk menunjukkan supremasi nilai-nilai dan norma-norma demokrasi agar kepercayaan rakyat dapat diraih. Kegagalan mengadili, sebaliknya, dapat menyebabkan sinisme dan ketidak percayaan rakyat terhadap sistem politik. Sejumlah analis percaya bahwa pengadilan dapat meningkatkan konsolidasi demokrasi jangka panjang. Salah satu argumennya yaitu bahwa jika tidak ada kejahatan yang diselidiki dan diadili, maka tidak akan tumbuh rasa percaya maupun norma demokrasi dalam masyarakat, dan karena itu tidak akan ada konsolidasi demokrasi yang sesungguhnya.

Dalam kondisi ini, pengadilan akhirnya jutsru bisa memperkuat kecederungan militer menantang institusi demokrasi. Disamping itu, mekanisme legal sebagai alternatif penyelesaian ternyata memiliki keterbatasan-keterbatasan, yaitu: *Pertama,* persyaratan bukti-bukti legal untuk suatu proses hukum sulit dipenuhi karena pada umumnya alat-alat bukti sudah lenyap atau sengaja dilenyapkan. *Kedua,* para korban atau saksi takut mengambil resiko memberikan kesaksian. *Ketiga*, lembaga peradilan pada umumnya lemah dan tidak dipercaya, terutama lembaga peradilan yang pernah menjadi instrumen rezim otoritarian sebelumnya, *keempat*, instrumen hukum yang tersedia tidak cukup mampu menjaring kejahatan

negara terorganisir, karena konstruksi pasal-pasal dalam hukum publik lebih pada kejahatan-kejahatan individual; dan *kelima,* anggota militer, sisa-sisa kekuatan orde otoritarian, termasuk birokrasi sipil yang pernah menjadi bagian dari kejahatan kemanusian masa lalu secara terbuka atau rahasia menentang dan mengancam setiap proses hukum yang akan mengungkap kejahatan rezim masa lalu itu.

Kesulitan dan kekuatiran akan tidak bisa bekerjanya proses hukum formal menangani kejahatan kemanusian masa lalu, ditambah kekuatiran jalan itu bisa menjerumuskan bangsa kembali ke rezim otoriter, merupakan dorongan kuat perlunya mekanisme lain, atau model penyelesaian alternatif, yang kemudian secara umum dikenal dengan "komisi kebenaran dan rekonsiliasi": sebuah jalan menghindar atau dalam istilah Tina Rosenberg, *"the dragon on the patience should not be awakened".*[30]

C. Dunia Hitam-Putih di Afrika Selatan

Pembentukan KKR, sebagaimana pengalaman banyak negara, tentu saja berada dalam konteks transisi pemerintahan, yaitu dari pemerintahan totaliter menuju pemerintahan demokrasi. Seperti pada masalah pelanggaran HAM di Afrika Selatan yakni dengan masalah politik Apartheidnya. Politik Apartheid yang membedakan ras dan warna kulit ini kemudian menjadi perbincangan dunia Internasional dan menjadi perhatian lebih. Karena politik ini lebih banyak merugikan orang-orang kulit hitam dibandingkan orang-orang kulit putih.

---

[30] BAB X KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR), yang diakses di

Maka dengan lahirnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan lekat dengan proses negosiasi ketat antara pimpinan partai nasionalis, pemerintah apartheid Afrika Selatan dengan kelompok-kelompok kekuatan oposisi yang diwakili African National Congress (ANC) pimpinan Nelson Mandela pada tahun 1993. Negosiasi tersebut membahas bermacam persoalan mengenai penghapusan sistem apartheid melalui konstitusi dan pemerintahan baru.

Tujuan Komisi ini adalah memajukan persatuan dan rekonsiliasi nasional supaya konflik-konflik dan diskriminasi masa lalu bisa diatasi. Tugas Komisi termasuk:

a. Menggambarkan selengkap mungkin bentuk, sebab dan luasnya pelanggaran berat HAM yang bermotif politik
b. Menggambarkan perspektif korban dan pelaku melalui penyelidikan dan public hearing
c. Memudahkan pemberian amnesti terhadap tindakan bermotif politik dari organisasi politik atau anggota aparat keamanan ketika menjalankan tugas dan kewajiban amnesti hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang telah berusaha mengungkap fakta-fakta yang terkait dengan tindakannya, mengakui secara publik kesalahannya dan motivasinya telah diuji
d. Menentukan nasib dan tempat korban berada, memberi kesempatan kepada mereka untuk menceritakan pengalaman mereka sendiri dan mengajukan usulan reparasi bagi mereka.[31]

Daerah Afrika Selatan sendiri selain tanahnya subur dan juga memiliki hasil penambangan emas, daerah itu juga pada awalnya dikuasi oleh bangsa Portugis.

---

[31] Memperjuangkan Kebenaran dan Rekonsiliasi,Sebuah Perspektif Korban Mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia yang disusun oleh Katarzyna Sienko ,diakses di

Akan tetapi sejak abad ke-7 diambil alih oleh bangsa Belanda. Mulai dari pengambil alihan kedudukan tersebut, Afrika menjadi daerah yang banyak diduduki orang-orang belanda. Karena banyak orang-orang Belanda yang atang dan menetap disana.

Kemudian pada tahun 1812, orang-orang Inggris mulai ikut memasuki wilayah Afrika Selatan dan mulai mendesak orang-orang belanda (Boer). Setelah terjadi perang hebat (perang boer), bangsa Belanda mengalami kekalahan, sehingga Afrika selatan dibagi menjadi 2 bagian yaitu Afrika selatan bagian utara diduduki oleh bangsa boer dan Afrika Selatan bagian selatan diduduki oleh Inggris, dibagian selatan Inggris mendirikan negara Natal dan Cape Town, sedangkan di bagian selatan berdiri 2 buah negara yaitu Oranye Vrijstaat dan Transvaal.[32]

Selama ratusan tahun tidak ada bagian kehidupan di Afrika Selatan yang tidak diatur oleh pemisahan ras. Namun sejak Partai Nasional de Boer 1948, setelah Perang Dunia ke-2, memenangkan pemilihan umum dan membentuk pemerintahan minoritas kulit putih, sistem apartheid kemudian ditetapkan dalam undang-undang. Pada tahun 1950, Undang-undang Pendaftaran Populasi semua warga Afrika Selatan dibagi dalam tiga kategori ras, yaitu Bantu atau Afrika kulit hitam, kulit putih dan kulit berwarna lainnya. Kemudian ada kategori baru, yaitu Asia yang sebagian besarnya adalah warga etnis India dan Pakistan.[33]

Afrika Selatan kemudian dibagi,80 persen wilayah negara itu dimiliki warga kulit putih. Sementara warga kulit hitam ditempatkan di wilayah termiskin yang

---

[32] Politik Apartheid di Afrika Selatan,yang diakses melalui,http://pendidikan4sejarah.blogspot.com/2011/08/politik-apartheid-di-afrika-selatan.html. tanggal 24 Okt 2013., Pkl. 10.45 wib.

[33] Apartheid Dunia Hitam Putih di AFrika Selatan, yang diakses

disebut sebagai *homelands* atau tanah air. Mereka memiliki semacam pemerintahan administrasi mandiri. Mereka secara ekonomi, sosial dan politik dikucilkan. Pada tahun 1970 diberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan Tanah Air Bantu. Semua warga kulit hitam harus bertempat tinggal di "homeland" atau tanah air, suatu wilayah yang dihuni mayoritas kulit hitam Afrika. Warga homelands harus membawa paspornya untuk dapat meninggalkan wilayahnya.

Pemisahan warga kulit putih dan hitam juga diberlakukan di fasilitas umum. Gedung-gedung umum, transportasi umum, taman-taman, rumah makan, serta tentu sekolah-sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit dan gereja. Daerah-daerah permukiman di setiap kota dan desa juga dibagi dua, sistem pendidikan sekolah terpisah dengan kualitas guru yang berbeda, dan hanya warga kulit putih yang memiliki hak pilih.[34]

Disini dapat kita lihat bahwasannya memang pemisahan hak antara kulit hitam dan kulit putih terjadi dan terlihat sangat jelas sekali pasca perang dunia ke-2. Bahkan di tempat-tempat umum sudah sangat lazim dan banyak ditemui papan-papan yang bertulisakan kawasan untuk kulit putih dan kulit hitam. Papan-papan tersebut berdiri tegak pada setiap kawasan atau wilayah di Afrika Selatan.

Orang-orang kulit hitam yang hanya diberikan tempat tinggal dengan wilayah yang kecil dan hidup dalam kemiskinan tidak bisa melakukan pembelaan apapun pada masa itu. Sekolah sebagai tempat mengenyam pendidikan juga dibedakan. Hanya orang-orang kulit putih saja yang bisa merasakan dan mendapatkan

Mereka hanya mendapatkan pendidikan seadanya dengan fasilitas yang sangat minim.

Homelands seperti yang sudah dituliskan diatas adalah salah satu tempat di daratan pinggiran Afrika Selatan yang sangat miskin dan minim akan sumber daya alam. Orang-orang kulit hitam sebagai kaum yang tersingkirkan dan didiskriminasi semuanya diletakkan dalam satu kawasan yang sama yaitu kawasan tersebut. Nampak jelas sekali perbedaan ras di Afrika Selatan pada waktu itu. Oarang-orang kulit hitam yang pada awalnya menganggap hal tersebut memang seharusnya terjadi disistem pemerintahan mereka, lambat laun menjadi tersadar bahwa yang dilakukan pemerintah adalah pemisahan ras yang semakin lama dirasa akan semakin memecah belahkan persatuan dan kesatuan di negara mereka sendiri, dengan cara diskriminasi tersebut.

Diskriminal yang dilakukan pemerintahan Afrika Selatan membangkitkan semangat bagi orang-orang kulit hitam untuk bangkit dan melakukan perlawanan. Namun segala bentuk perlawanan yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil. Karena setiap mereka akan melakukan perlawanan maka pemerintah dengan sigap membereskan dan menyingkirkan perlawanan tersebut. Namun hal-hal semacam inilah yang membuat orang-orang kulit hitam di Afrika Selatan semakin bangkit untuk bisa berjuang lebih keras untuk bisa mendapatkan hak persamaannya dan semakin menumbuhkan semangat pantang menyerah mereka.

D. Perkembangan Masalah Politik Apartheid di Afrika Selatan

Pada tahun 1910 Perang Boer kedua berakhir dan Inggris berhasil

republik dengan presidennya Hendrik Verwoed. Verwoed yang berhasil membuat kebijakan untuk memisahkan mayoritas orang kulit putih dan mayoritas kulit hitam justru malah menimbulkan diskriminasi antara keduanya. Sebelum dilaksanakan Politik Apartheid sebenarnya telah lama dilakukan hal-hal yang merupakan gejala Apartheid, antara lain:

1) Native Land Act (Undang-undang Pertanahan Pribumi) tahun 1913 yang melarang kulit hitam membeli tanah diluar daerah yang sudah disediakan bagi mereka.
2) Undang-undang Imoraitas tahun 1927 yang melarang terjadinya perkawinan campuran antara kulit putih dengan kulit hitam atau kulit berwarna lainnya.[35]

Dua peraturan diatas tersebut sebenarnya sudah sangat jelas sekali menggambarkan tentang bagaimana politik Apartheid di Afrika Selatan ini telah dilakukan. Siapa saja pun dapat dengan mudahnya memahami bahwasannya peraturan-peraturan yang dibuat tersebut memang untuk memisahkan mereka yaitu orang-orang kulit putih dan kulit hitam. Kemudian pada tahun 1976 setelah turunnya Verwoed menjabat sebagai Presiden dan digantikan oleh Pieter Botha, maka pada masa penjabatannya sebagai Presiden Botha membuat pernyataan yang diumumkan pada saat itu, yakni jika homeland-homeland yang dibentuk itu dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bagian negara yang otonom.

Namun dengan pembentukan seperti itu tentunya dapat dengan mudah siapa saja mengerti jika hal itu dilakukan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan Afrika Selatan dan juga unruk melindungi pemerintahan minoritas bangsa kulit putih di daerah tersebut. Pada awalnya orang-orang kulit hitam tidak terlalu

---

[35] Politik Apartheid di Afrika Selatan, yang diakses

mengerti mengapa kebijakan pemerintahannya seperti itu. Maka dari itu mereka hanya bisa berdiam diri. Namun lambat laun mereka mengerti jika pemerintah mereka bertujuan untuk membuat pemerintahan yang diskriminasi rasial (perbedaan warna kulit).[36]

Maka dengan adanya pemerintahan seperti ini yang telah dibentuk oleh Botha, tentu saja masyarakat kulit hitam tidak tingga diam. Mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintahan ini. Namun apa yang terjadi, ternyata Botha, membalasnya dengan tindakan yang lebih kejam. Yakni dengan menumpas dengan kejam setiap perlawanan yang terjadi. Bangsa kulit hitam juga mempunyai pelopor tokoh-tokoh yang kuat yang bisa membawa keselarasan bagi mereka. Namun yang terjadi adalah para tokoh-tokoh ini malah dijebloskan kedalam penjara.

Salah satu tokoh kulit hitam yang paling kharismatik dan terkenal adalah Nelson Mandela yang harus dengan terpaksa mendekam di penjara selama 27 tahun. Selain perlawanan bersenjata, usaha-usaha mengakhiri Politik Apartheid juga dilakukan melalui perjuangan politik. Partai-partai yang terkenal antara lain Partai Konggres (ANC) pimpinan Nelson Mandela dan Inkatha Freedom Party pimpinan Mongosuthu Buthulesi. Salah seorang tokoh pergerakan Afrika Selatan yang juga sangat terkenal adalah Uskup Agung Desmond Tutu.

Namun perjuangan tiada henti mereka belum juga menemui hasil. Malah terkesan semakin menjadi-jadi akan perbedaan ras ini. Para kaum kaum Kristen Kalvanis (orang-orang belanda) yang datang pertama kali ke Afrika Selatan telah memandang penduduk pribumi kulit hitam dengan pandangan yang rendah.

---

[36] [illegible] 24 Okt 2012

Penduduk pribumi dianggap sebagai bangsa yang biadab, primitif dan dianggap sebagai keturunan putra-putra Ham (anak kedua Nabi Nuh) yang dikutuk oleh Tuhan untuk jadi budak. Pandangan itu yang menyebabkan terjadinya perbudakan atas bangsa kulit hitam oleh penduduk kulit putih.[37]

Penduduk kulit putih yang memperbudak kaum kulit hitam, memperlakukannya dengan semena-mena dan seakan tidak menghargai apapun yang telah mereka (kulit hitam) lakukan untuk kaum kulit putih. Upah yang diberikan pun tidak pernah sesuai dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan. Akibat perbudakan ini banyak usaha yang mencari keuntungan besar. Salah satunya adalah usaha pertambangan intan dan emas. Para pemilik tambang dapat dengan mudah memperoleh budak dan mempekerjakan mereka dengan memberi upah yang sangat rendah.

Selain itu juga tempat tinggal mereka antara kulit hitam dan kulit putih harus dipisah. Daerah tempat tinggal kulit hitam telah disediakan tersendiri, yaitu suatu daerah khusus yang jauh terpisah dan berpagar rapat. Selain itu jika kulit hitam ingin keluar dan masuk dari daerahnya haruslah melewati penjagaan yang ketat, dimana mereka diminta untuk menunjukkan surat pas. Surat pas adalah surat yang wajib dimiliki oleh kaum kulit hitam di Afrika Selatan guna sebgai identitas mereka tinggal disana.

Padahal sebelumnya pada awal abad ke-19 kulit hitam dan kulit pitih masih bisa tinggal dalam satu kawasan yang sama. Hal ini tidak menjadi persoalan yagn begitu berarti. Namun pada awal abad ke-20 mereka (kaum kulit hitam) digiring kedaerah pinggiran. Penduduk peranakan dan keturunan India juga termasuk

[37] Ibid., diakses pada 24 Okt 2013.

bangsa yang diusir dari kota. Sebuah perkampungan kulit hitam yang besar yang telah disiapkan ialah perkampungan Soweto di sekitar Johannesrburg. Sejauh mata memandang yang tampak hanyalah kompleks-kompleks pemukiman yang amat luas dengan rumah-rumah primitif yang kotor. Demikian pandang Kennedy, Senator Amerika Serikat yang mengunjungi Afrika Selatan. Rumah-rumah itu tidak disediakan pemerintahan dengan cuma-cuma, tetapi ditarik sewa yang amat tinggi, sementara upah para buruh amat rendah.

Karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap pemerintah yang kian menjadi-jadi. Maka orang-orang kulit hitam pun melakukan aksi penolakan. Maka dengan melakukan pergerakan yang pada saat itu dibawah naungan partai ANC (Africant National Congress) yang dibentuk oleh Nelson Mandela, maka orang-orang kulit hitam pun melakukan aksi mereka. Mereka tidak menggunakan kekerasan dalam aksinya, namun menggunakan simpati politik dari negara-negara lain dan Internasional.

Pada saat orang-orang kulit hitam melakukan demonstrasi terhadap pemerintah, maka Perdana Mentri Vorster menolak untuk menggunakan langkah damai dalam mengambil keputusan. PM tersebut menolak adanaya upaya untu meratifikasi peraturan yang ada dengan mengikut sertakan orang-orang kulit hitam didalamnya. Lalu kemudian gejolak demonstran semakin bertambah. Sampai pada akhirnya memakan banyak korban yang menyebabkan mereka meninggal dunia dan korban lainnya luka-luka.

Maka dengan adanya banyak jatuhnya korban jiwa tersebut Dewan Keamanan PBB menyatakan jika politik Apartheid yang diskriminasi merupakan

perdamaian dan keamanan international. Maka PBB berseru kepada Afrika Selatan agar mengambil tindakan untuk mewujudkan harmoni rasialatas dasar persamaan dan melepaskan kebijaksanaan-kebijaksanaan Apartheid dan diskriminasi rasial. Pada tanggal 7 Agustus 1963 Dewan Keamanan mengulangi seruannya sambil menghimbau kepada semua negara agar menghentikan penjualan senjata dan perlengkapan militer kepada Afrika Selatan. Pada tanggal 4 Desember 1963, Dewan Keamanan mengutuk sikap acuh tak acuh pemerintah Afrika Selatan dan mengulangi kembali seruannya kepada semua negara agar menggunakan embargo senjata.

Maka dengan ancaman dari Dewan Keamana tersebut dan juga mendapatkan tekanan Internasional, pada akhirnya Afrika Selatan membebaskan para tokoh-tokoh pembela kulit hitam yaitu Nelson Mandela dan yang lainnya. Langkah inilah yang diambil oleh presiden Afrika Selatan yang menjabat pada waktu itu. Kemudian pada akhirnya setelah melewati beberapa masa. Nelson Mandela terpilih menjadi Presiden pertama Afrika Selatan pada masa itu setelah melalui sebuah pemilu yang dianggap paling demokratik di Afrika Selatan sampai saat itu.

Dalam Komisi terdapat tiga komite yaitu Komite Pelanggaran HAM, Komite Amnesti dan Komite Reparasi dan Rehabilitasi yang dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Masing-masing Komite diberi tugas yang berbeda dan sesuai dengan wewenangnya. Dibandingkan dengan beberapa Komisi negara lain, Komisi Kebenaran di Afrika Selatan diberi wewenang untuk memanggil orang, menyita dokumen dan artikel. Individu yang dipanggil oleh Komisi wajib menjawab

Selama satu tahun Komisi berhasil mendengarkan kesaksian lebih dari 12.000 korban. Public hearing Komisi diselenggarakan di seluruh wilayah negara bersangkutan. Public hearing ini didukung oleh ulasan pers yang sangat lengkap. Sering kesaksian korban disiarkan lewat radio. Sebagian besar korban yang diberi kesempatan untuk menggambarkan penderitaannya menganggap bahwa forum publik yang diselenggarakan sangat menolong proses penyembuhan mereka sendiri, disamping langkah-langkah pengumpulan kesaksian korban sendiri, Komisi juga mengadakan public hearing untuk memeriksa konteks munculnya pelanggaran HAM di Afrika Selatan. Anggota Komisi mewawancarai secara individu para anggota partai-partai politik, pekerja pers, anggota lembaga-lembaga hukum dan karyawan dibidang perusahaan dan kesehatan untuk menentukan perannya dalam pelanggaran HAM masa lalu.

Selama ini Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan dianggap sebagai model penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang terkuat khususnya karena sangat berfokus pada kepentingan korban. Proses penyusunan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia memang sangat dipengaruhi oleh pengalaman Komisi di Afrika Selatan.

Komisi Kebenaran tidak bisa dan tidak boleh menggantikan fungsi pengadilan, karena mereka bukan badan peradilan, mereka bukan persidangan hukum, dan mereka tidak memiliki kekuasaan untuk mengirim seseorang ke penjara atau memvonis seseorang karena suatu kejahatan tertentu. Hanya saja, KKR dapat melakukan beberapa hal penting yang secara umum tidak dapat dicapai melalui

Komisi Kebenaran dapat menangani kasus dalam jumlah relatif lebih besar dibandingkan pengadilan pidana. Dalam suatu situasi di mana terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat yang meluas dan sistematis di bawah rezim sebelumnya, Komisi Kebenaran dapat menyelidiki semua kasus-kasus atau sejumlah besar kasus yang ada secara komprehensif dan tidak dibatasi kepada penanganan sejumlah kecil kasus saja. KKR juga berada dalam posisi untuk menyediakan bantuan praktis bagi para korban dengan secara spesifik, mengidentifikasi dan membuktikan individu-individu atau keluarga-keluarga mana saja yang menjadi korban kejahatan masa lampau, sehingga mereka secara hukum berhak untuk mendapatkan bentuk reparasi di masa yang akan datang.[38]

KKR juga dapat dipakai untuk mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan besar seperti bagaimana sebuah pelanggaran hak asasi manusia terjadi, kenapa itu terjadi dan faktor apakah yang terdapat dalam masyarakat dan negara kita yang memungkinkan kejadian tersebut terjadi perubahan-perubahan apa saja yang kita harus lakukan untuk mencegah tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia itu tidak terulang kembali, dan sebagainya.[39]

Rekonsiliasi sebagai kata kunci dari pembentukan KKR jelas terkait dengan usaha memperbaiki hubungan sosial, politik dan psikologis antarwarga negara sebagai pribadi atau kelompok dengan negara akibat perlakuan atau tindakan negara yang tidak adil dan tidak manusiawi. Rekonsiliasi itu diperlukan untuk membangun masa depan bangsa dan negara yang demokratis diatas pilihan sikap

---

[38] Contohnya, Komisi Kebenaran di Chili yang mengidentifikasi masing-masing orang dan anggota keluarga yang kemudian menjadi layak untuk berbagai fasilitas dari pemerintah di masa yang akan datang, seperti beasiswa sekolah, subsidi perumahan, asuransi kesehatan. dan pensiun. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai peraturan tentang kompensasi dan rehabilitasi di Chili, lihat *Summary of the Truth and Reconciliation Report*, Komisi Hak Asasi Manusia. Centro IDEAS. Departemen Luar Negeri Chile. Untuk informasi yang terperinci, tersedia di *Report of the Chilean National Commission on Truth and Reconciliation*, dapat diakses melalui website www.derechoschile.com/English, resour.html

memaafkan atau melupakan dan bukan penuntutan pidana.

Rekonsiliasi mensyaratkan dilakukannya pengungkapan kebenaran, di Afrika Selatan hal itu merupakan prinsip dasar, dan perhatian internasional terhadap komisi ini menimbulkan anggapan bahwa semua komisi kebenaran terutama dibentuk untuk mendorong rekonsiliasi dan rekonsiliasi yang dimaksud adalah rekonsiliasi politik nasional, dan bukan rekonsiliasi individual. Keberhasilan komisi kebenaran sebagian diperhitungkan dari seberapa besar kemampuan dan keberhasilannya menciptakan rekonsiliasi.[40]

Rekonsiliasi yang dilakukan setelah pemerintahan Apartheid berhasil diturunkan yakni perbaikan pembangunan yang utama dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Ekonomi di Afrika Selatan sebenarnya cukup baik, namun selama pemerintahan Apartheid kelompok kulit hitam hidup dibawah garis kemiskinan. Hanya orang-orang kulit putih dan penjajah yang bisa merasakan kenikmatan dan mendapatkan kehidupan yang layak. Orang-orang kulit hitam yang diperbudak dan diupahi dengan upah yang sangat minim tentu saja tidak bisa merasakan kehidupan yang layak. Perekonomian Afrika Selatan pada masa itu memang belum bisa dikatakan dalam kondisi baik.

Afrika Selatan sendiri adalah sebuah negara yang maju dengan penduduk yang berpendapatan sederhana. Negara ini kaya dengan bahan tambang, terutamannya bahan tambang bernilai tinggi seperti emas, platinum dan berlian. Afrika Selatan juga mempunyai sistem keuangan, perundangan, telekomunikasi, energi, infrastruktur yang maju dan modern. Bursa sahamnya di Johannesburg begitu aktif hingga pernah berada di urutan ke-10 terbesar di dunia. Maka dirasa akan sangat

---

[40] BAB X, KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR).yang diakses melalui http://pusham.uii.ac.id/ham/16_Chapter10.pdf

mudah bagi Afrika Selatan untuk bisa memperbaiki perekonomian masyarakatnya pasca politik Apartheid yang berkuasa di negaranya. Karena pada kenyataannya kehidupan disana sudah dapat dikatakan baik. Namun ada beberapa masyarakat dipinggiran Afrika Selatan yakni orang-orang kulit hitam yang belum merasakan kemakmuran itu. Tetapi hal itu bukanlah hambatan yang menyulitkan bagi pemerintahan Afrika Selatan untuk memperbaiki kesulitan ekonomi yang dihadapinya.

Sejak kedatangan Inggris disana, ekonomi negara bergantung kepada sektor pertambangan. Tetapi beberapa dasawarsa yang lalu, kegiatan tersebut telah digantikan oleh sektor produksi. Sektor industri Afrika Selatan sangat maju, dan merupakan ekonomi terbesar di dunia dan menempati peringkat ke-25. Hanya dengan 7% penduduk dan 4% jumlah keseluruhan kawasan di Afrika, Afrika Selatan mengeluarkan lebih dari sepertiga produk dan jasa di Afrika. Bahan-bahan komoditas yang diekspor antara lain adalah alat-alat mesin, makanan dan peralatan, bahan kimia, produk petroliam dan peralatan ilmiah.

Afrika Selatan sempat membukan perbatasannya selepas berakhirnya apartheid, yang kemudian banyak sindikat NAPZA yang masuk ke Afrika Selatan. Hal ini sempat membuat perekonomian di Afrika Selatan semakin menurun. Karena banyak investor asing yang khawatir akan masalah ini dan akan berpengaruh terhadap usaha mereka di Afrika Selatan. Pada tahun 2002 masalah ini kemudian menjadi permasalahan yang sangat pelik adn menjadi agenda utama negara untuk diselesaikan. Sebanyak 30% penurunan Rand (mata uang Afrika) akibat masalah NAPZA ini. Namun ditahun 2004 mata uang Rand telah kembali

Kemudian pada tahun 1980-an dianggarkan sekitar 16 juata penduduknya hidup dibawah garis kemsinan dan 23 juta orang beresiko kekurangan gizi dan kekurangan pangan. Walaupun begitu, pemerintahan baru Afrika Selatan yang telah berganti ke pemerintahan kulit hitam telah berhasil mengentaskan kemiskinan orang-oarang kulit hitam tersebut. Kemiskinan yang pada awalnya mencapai 42% pada tahun 1994 kini telah mencapai 24% pada tahun 2003. Maka dapat dipastikan jumlah ini sudah semakin menurun di tahun 2013.

Pendidikan di Afrika Selatan pada masa pemerintahan Apartheid mengalami pembedaan. Dimana kulit putihlah yang dapat mengeyam pendidikan dan mendapatkan fasiltas yang sangat baik, sedangkan kulit hitam hanya mendapatkan pendidikan seadanya saja atau bahkan bisa dibilang mendapatkan fasilitas yang sangat minim sekali. Masa pesekolahan di Afrika Selatan adalah selama 13 tahun atau 13 tingkat. Namun tahun pertama pendidikan atau tingkat 0dan tiga tahun terakhir yaitu dari tingkat 10 hingga tingkat 12 (juga disebut "matric") tidak diwajibkan. Kebanyakan sekolah dasar menawarkan tingkat 0, tetapi tingkat ini dapat juga disebut dengan TK disistem pendidikan kita atau yang lebih familiar.

Lazimnya untuk memasuki Universitas atau perguruan tinggi seseorang harus wajib lulus "matric" dengan minimum tiga mata pelajaran tingkat tinggi dan bukan hanya sejedar lulus (standar) tetapi juga harus benar-benar lulus yang benar-benar mengerti pelajaran tersebut. Malah beberapa Universitas prestisius akan mengenakan syarat akademik yang lebih tinggi. Walaupun begitu, mereka yang lulus "National Senior Certificate" layak untuk belajar di Universitas teknikal ternama dan terbaik.

Selama dibawah pemerintahan sistem Apartheid, sistem pendidikannya dirangka berdasarkan warna kulit, yaitu kementrian yang berbeda untuk pelajar kulit putih, bewarna, Asia dan kaum kulit hitam di luar Bantustan. Pengasingan ini telah menghasilkan 14 kementrian pendidikan yang berada di Afrika Selatan. Penstrukturan sistem pendidikan selepas era-apartheid merupakan tantangan yang besar bagi pemerintahan negara ini. Pemerintahan baru telah membentuk suatu sistem pendidikan nasional tanpa diskriminasi kaum tetapi menggabungkan 14 kementerian pendidikan merupakan tugas yang sukar. Oleh karena itu pada Februari 1996, Kementerian Pendidikan telah meluncurkan suatu kurikulum baru yang dinamakan "Curriculum 2005".

Kurikulum ini yang akan menggantikan dasar pendidikan berdasarkan apartheid, akan memberi tumpuan kepada hasilnya yaitu pelajar akan menjadi lebih proaktif dalam lingkungan di sekitarnya dan juga di dalam masyarakat. Untuk mencapai obyektif ini, pada 1999 pemerintahan telah menyediakan 5,7 persen anggaran belanja untuk sektor pendidikan termasuk membangun 2.000 sekolah-sekolah baru, 65.000 ruang kelas yang baru dan beralatan lengkap, 60.000 guru-guru yang terlatih dan 50 juta buku teks yang dicetak.

Pada 2004, Afrika Selatan mempunyai 366.000 guru dan hampir 28.000 sekolah-sekolah -termasuk 390 sekolah khusus dan 1.000 sekolah swasta. Dari jumlah ini, 6.000 adalah sekolah tinggi (tingkat 7 hingga tingkat 12) dan selebihnya adalah sekolah dasar (tingkat 1 hingga tingkat 6).

Afrika Selatan juga mempunyai suatu sistem pendidikan tinggi yang maju, yang juga dipisahkan mengikut ras sewaktu era apartheid. Pada 1995 terdapat 285.000 pelajar di 21 universitas dan 100.000 pelajar di "technikon"

(institut teknikal atau vokasional). Hampir 37 persen adalah dari golongan kulit putih. Tetapi sejak 1994,penyertaan pelajar kulit hitam di universitas-universitas yang dikhususkan untuk pelajar kulit putih telah bertambah secara mendadak.[41]

Kedua pembanguna tersebut tidak dapta terjadi tanpa ada bantuan KKR. Meskipun KKR tidak langsung turun tangan membantu pembangunan ini namun KKR secara tidak langsung telah membantu pencapaian pembangunan di Afrika Selatan. Karena tanpa KKR yang dibuat di Afrika Selatan masalah Apartheid tidak akan terselesaikan. Seklaipun Nelson Mandela membela tetap saja masih membutuhkan bantuan pihak lain. KKR membantu menyelesaikan permasalahan Apartheid ini maka dengan begitu pemerintahan Apartheid turun dan membuat infrastruktur yang membedakan ras telah dapat dihapuskan. Kini Afrika Selatan sudah bisa hidup berdampingan yang satu dengan yang lain tanpa ada perbedaan hitam dan putih.

---

[41] About South Africa, yang diakses melalui http://www.southafrica.info/about/ pada 15 Nov 2013, pkl